



PENETAPAN

Nomor 0183/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Haeruddin bin La Nure, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Batu-Batu RT. 003, RW. 003, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Ira binti Sahabuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Batu-Batu RT. 003, RW. 003, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 24 September 2019 dengan register perkara Nomor 0183/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 3 April 2019 di Pare-Pare;

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam Pernikahan tersebut adalah Sahabuddin ayah kandung Pemohon II Dinikahkan oleh Andi Ahmad imam kampung setempat dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Syamsia binti Lanure dan Rabania binti Lanure dengan mahar 11 ringgit;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Muh Dzul Abibu Rahman;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak bernama Muh Dzul Abibu Rahman;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Haeruddin bin La Nure**) dengan Pemohon II (**Ira binti Sahabuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2019 di Pare-Pare,;

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

S u b s i d a i r

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Haeruddin Nomor 73120511 04190004 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Syamsia binti La Nure, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 April 2019 di Parepare.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabuddin.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama Andi Ahmad.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Henreng bin Messe dan Karatte bin Messa.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 11 ringgit.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.

2. Rabania binti La Nure, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 April 2019 di Parepare.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabuddin.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama Andi Ahmad.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalahdan
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II uang 11 ringgit.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.

BahwaselanjutnyaparaPemohontidakmengajukanapapunlagidanmohonpenetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April 2019 di Pare-Pare yang menjadi Wali Nikah dalam Pernikahan tersebut adalah Sahabuddin ayah kandung Pemohon II Dinikahkan oleh Andi Ahmad imam kampung setempat dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Syamsia binti Lanure dan Rabania binti Lanure dengan mahar 11 ringgit, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syamsia binti La Nure dan Rabania binti La Nure, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 3 April 2019 di Parepare, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabuddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung bernama Andi Ahmad, dengan maskawin berupa uang 11 ringgit dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syamsia binti Lanure dan Rabania binti Lanure.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini dengan pelayanan terpadu dan segala biaya ditanggung oleh pemerintah daerah maka biaya perkara dibebankan kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Haeruddin bin La Nure) dengan Pemohon II (Ira binti Sahabuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2019 di Pare-Pare, Kota Pare-Pare.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019 sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H., sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Musdhalipah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd.

Salmirati, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd.

Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp125.000,00
4. PNBP Pgl Pemohon I	:Rp 10.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h

Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Lukman Patawari,S.H

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)